
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG RESPONSIF DI DESA BANING KOTA KECAMATAN SINTANG

Jhony Fredy Hahury

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92,
Sintang, Indonesia, email: jf28hahury@gmail.com

Abstract: *Responsive village governance is integral to the implementation of good governance, aimed at establishing a government that effectively addresses community issues, needs, and services. This study seeks to describe and analyze responsive governance in Baning Kota Village, Sintang District. Findings indicate that the Baning Kota Village Government has successfully adopted responsive governance through development programs, empowerment initiatives, and public services. The community has notably acknowledged efforts to accelerate development, empowerment, and access to services. However, village officials encounter challenges such as limited knowledge of information technology and insufficient community participation in village forums. Consequently, achieving responsive governance necessitates a robust commitment from all stakeholders, including the village government, the Village Consultative Body (BPD), and the community, to synergize and enhance collaboration, thereby fostering public trust in an effective and progressive village government and development programs.*

Keywords: *Governance, responsive.*

Abstrak: Tata kelola pemerintahan desa yang responsif sebagai bagian dari implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam mewujudkan pemerintahan tanggap terhadap problem, kebutuhan dan pelayanan di masyarakat. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tata kelola pemerintahan yang responsif di Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang. Hasilnya menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Baning Kota telah menjalankan tata kelola responsif, melalui program pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan publik. Upaya yang dilakukan untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan serta akses masyarakat bisa dirasakan oleh masyarakat. beberapa kendala yang dihadapi aparat desa dalam menguasai teknologi informasi, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam forum-forum desa. Dengan demikian, untuk menuju pemerintahan yang responsif diperlukan komitmen yang kuat dari semua elemen mulai dari pemerintah desa, BPD, dan masyarakat agar bersinergi dalam penguatan kerjasama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada program-program pemerintahan dan pembangunan desa yang efektif dan maju.

Kata Kunci: Tata kelola pemerintahan, responsif.

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab yang diyakini mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang berciri pemerintahan dinamis (*dynamic governance*), antara lain cepat, responsif, dan efisien. Kemajuan pemerintahan dan pembangunan yang sejahtera diperlukan sebuah visi yang efektif akan mencapai hasil yang optimal. Pada sisi lain, tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari kewenangan pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri sesuai meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan adil. Hal inilah yang membawa pemerintah desa untuk bersikap lebih responsif dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan dan aspirasi warganya.

Desa Baning Kota Kecamatan Sintang merupakan salah satu desa yang mengalami dinamika pembangunan cukup pesat, sebab berada di tengah ibu kota kabupaten Sintang. Perkembangan ini tidak terlepas dari dinamika transformasi masyarakat dan teknologi informasi yang begitu pesat. Namun, kecepatan pembangunan harus diiringi oleh kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, dan bertanggung jawab. Pemerintah desa yang responsif tentunya akan merespon terhadap kebutuhan masyarakat, serta tanggung jawab dalam pengelolaan program dan anggaran desa. Hal ini menjadi indikator penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa harus dapat dijalankan oleh aparatur desa karena masyarakat desa telah berkembang dengan berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan aparatur pemerintah yang profesional. Seiring dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan akan layanan semakin kompleks yang diperlukan cepat, dan tepat yang diperlukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan yang responsif diperlukan agar kinerja aparatur desa mampu bekerja dan merespon setiap masalah dan kebutuhan masyarakat.

Betapa pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang responsif kepada setiap persoalan yang ada pada sosial masyarakat. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat akan dielaborasi dalam program-program desa yang bermuara pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Dalam rangka kemajuan pemerintahan dan pembangunan desa, diperlukan kerjasama berkesinambungan agar Pemerintahan desa dapat berjalan dengan efektif serta peningkatan akses maupun kualitas hidup masyarakat dapat berjalan dengan baik. Hasil observasi yang dilakukan oleh penulis Desa Baning Kota menunjukkan bahwa responsif dalam hal berbagai program seperti, Pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan infrastruktur.

Tata kelola pemerintahan yang responsif merupakan bentuk implementasi dari prinsip *good governance* yang menekankan pentingnya pemerintah untuk cepat dan tepat dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, responsivitas pemerintah seringkali dihambat oleh berbagai faktor baik dari sisi internal birokrasi maupun eksternal masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Abidin, 2016: 102) “responsif adalah cepat merespon bersifat menanggapi, teguh hati, bersifat memberi tanggapan (tidak masa bodoh). Sedangkan sikap responsif merupakan kesadaran akan tugas yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh”.

Menurut Abidin (2016:102) ciri utama dalam memiliki sikap responsif adalah sebagai berikut: 1. Kesadaran akan tugas yang harus dilakukan dengan kesungguhan. 2. Kepekaan yang tajam dalam menghadapi berbagai hal yang dihadapinya. 3. Kepahaman makna tanggungjawab yang harus dipikul. Oleh karena itu, responsif merupakan kemampuan dan kecenderungan untuk memberikan tanggapan dengan tepat dan bijaksana. Cepat atau lambat dalam memberikan tanggapan dilakukan dengan mengenali dan memahami situasi atau permintaan atau kebutuhan yang ada di masyarakat.

Menurut Sutrisno (2021:88) “responsivitas pemerintah tidak hanya bergantung pada niat baik pemimpin, tetapi juga pada sistem dan budaya birokrasi yang mendukung. Tanpa sistem yang baik, respons pemerintah

akan lambat, tidak tepat sasaran, atau bahkan diabaikan”. Tanpa responsivitas dan tanggung jawab, kebijakan pembangunan sering kali tidak tepat sasaran dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana praktik tata kelola yang responsif dan bertanggung jawab diterapkan di Pemerintah Desa Baning Kota.

Responsif sebagai kemampuan pemerintahan desa untuk berperan dan mengenali kebutuhan masyarakat dan menyediakan pelayanan yang sesuai dengan harapan publik. Responsivitas menjadi tolok ukur kinerja pemerintah desa dalam merespon aspirasi dan kebutuhan warganya secara tepat waktu dan relevan. Tata kelola pemerintahan desa merupakan sistem dan mekanisme dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah desa secara terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Tata kelola yang baik di tingkat desa tidak hanya berfokus pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga bagaimana pemerintahan mampu membangun kepercayaan masyarakat. Yang menurut Suradika (2019:73) “tata kelola desa harus mencerminkan prinsip-prinsip dasar *good governance* yang disesuaikan dengan konteks lokal, termasuk nilai-nilai musyawarah, gotong royong, dan partisipasi aktif warga desa”. Dengan kata lain, pemerintah desa harus membuka ruang partisipasi masyarakat serta bersikap tanggap dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan warganya.

Pemerintahan yang responsif adalah pemerintahan yang mampu secara cepat, tepat, dan terbuka menanggapi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks desa, responsivitas mencakup kemampuan aparatur desa untuk menyesuaikan program kerja dengan kondisi nyata di masyarakat, serta merespons keluhan masyarakat secara efisien.

Menurut Hardiyansyah (2021:111), responsivitas dalam pemerintahan desa tercermin dalam kecepatan pelayanan, kemampuan menyerap aspirasi warga, serta fleksibilitas dalam merespons dinamika sosial. Pemerintah desa yang responsif akan lebih dipercaya dan mendapat dukungan luas dari warganya dalam setiap kebijakan pembangunan. Sebagaimana diketahui bahwa bentuk responsif dari Pemerintah Desa Baling Kota dapat dilihat dari bagaimana perangkat desa merespons kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan gang, lingkungan, drainase, dan air bersih berdasarkan masukan dari masyarakat melalui musyawarah desa (musdes).

Bentuk konkrit yang direspon ini sebagai akuntabilitas dalam rangka tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik atas setiap kebijakan, program, dan penggunaan sumber daya yang dilakukannya. Pemerintah desa yang bertanggung jawab harus memiliki sistem pelaporan, evaluasi, dan transparansi yang dapat diakses oleh masyarakat. Sebagaimana Suharyo (2020:88) menyebutkan bahwa

“akuntabilitas desa ditunjukkan melalui keterbukaan informasi, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, serta pelaporan keuangan yang dapat diuji kebenarannya. Pengelolaan dana desa, akuntabilitas menjadi sangat penting untuk menghindari penyimpangan dan memastikan dana digunakan sesuai perencanaan”.

Cermin pertanggungjawaban dilihat dari publikasi laporan realisasi APBDes melalui papan informasi desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan kegiatan pembangunan. Hasil observasi penulis diketahui informasi bahwa laporan anggaran tahunan dibuat oleh Pemerintah Desa Baling Kota melalui bendahara, sekretaris desa, Kaur keuangan dan kepala desayang terperinci dan diketahui oleh masyarakat. Tidak hanya laporan saja tapi Pemerintah Desa mengadakan forum diskusi publik atau konsultasi dengan masyarakat sebelum mengambil keputusan penting, seperti perencanaan pembangunan infrastruktur sebagai bentuk berkolaborasi dengan elemen masyarakat.

Responsivitas dan akuntabilitas bukanlah dua konsep yang berdiri sendiri. Justru, keduanya harus berjalan sinergis dalam tata kelola pemerintahan desa. Pemerintah desa yang hanya responsif tetapi tidak bertanggung jawab berisiko menghasilkan kebijakan yang populis tetapi tidak berkelanjutan. Sebaliknya, akuntabilitas yang kaku tanpa respons terhadap aspirasi masyarakat akan menjadikan

pemerintahan desa bersifat administratif dan tidak proaktif.

Sebagaimana Suradika (2019:73) bahwa tata kelola pemerintahan desa yang baik dapat tercipta melalui sinergi antara partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab aparatur desa dalam merespons kebutuhan lokal. Sesuai dengan pendapat Hardiyansyah (2021:111) bahwa pemerintahan yang responsif dicirikan oleh pelayanan cepat dan kesediaan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Selanjutnya Winarno (2016:135) menyatakan bahwa tata kelola desa yang baik hanya dapat tercapai bila pemerintah desa bersikap responsif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta bersikap akuntabel dalam penggunaan keuangan desa dan hasil kerjanya. Dengan prinsip yang disebutkan menjadi penting terciptanya kepercayaan publik.

Praktiknya di Desa Baning Kota, kolaborasi antara perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan pemuda dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan mencerminkan upaya ke arah tata kelola yang seimbang antara responsif dan bertanggung jawab. Sebagai data observasi yang dilakukan salah satu ciri pemerintahan yang responsif, yakni : Cepat merespon aspirasi, warga. Respon atas keluhan atau masukan masyarakat dalam waktu yang singkat. Seperti dikemukakan oleh Harjanto (2020:74), responsivitas terlihat dari seberapa cepat dan tepat kebijakan dirumuskan berdasarkan dinamika yang berkembang di masyarakat.

Mendengarkan dan Mengakomodasi Kepentingan Masyarakat. Sebagaimana disebutkan oleh Nugroho & Sari (2022:89), bahwa pemerintah responsif membuka kanal komunikasi yang aktif dan dua arah dengan masyarakat.

Berdasarkan kajian literatur di atas, beberapa dimensi utama dari tata kelola pemerintahan yang responsif, yakni :

- a. Dimensi Komunikatif. Pemerintah harus membuka ruang komunikasi yang luas, cepat, dan efisien dengan masyarakat. Nugroho & Sari (2022) menjelaskan bahwa komunikasi dua arah menjadi fondasi bagi terciptanya responsivitas pemerintahan yang inklusif.
- b. Dimensi Partisipatif. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Putri (2023), partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan desa merupakan bentuk nyata dari pemerintahan yang responsif di tingkat lokal.
- c. Dimensi Adaptif. Kemampuan menyesuaikan kebijakan dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi. Adaptasi ini menuntut fleksibilitas birokrasi dan inovasi kebijakan. Harjanto (2020) menyebutkan bahwa pemerintahan yang responsif harus mampu melakukan perbaikan kebijakan secara cepat dan relevan terhadap perubahan zaman.
- d. Dimensi Aksesibilitas Layanan. Pemerintah responsif memastikan bahwa pelayanan publik dapat diakses oleh seluruh lapisan

masyarakat tanpa diskriminasi. Rizal (2021) menggarisbawahi bahwa digitalisasi pelayanan publik merupakan bentuk nyata peningkatan responsivitas pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena tata kelola pemerintahan desa yang responsif dan bertanggung jawab secara mendalam berdasarkan fakta lapangan. Menurut Sugiyono (2019:9), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel data dilakukan secara *purposive dan snowball*, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Jenis penelitian ini dipilih agar peneliti dapat menggali realitas sosial dan proses pemerintahan desa secara kontekstual dan alami sesuai kondisi di Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang. Penelitian ini dilakukan di Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Lokasi ini dipilih karena memiliki dinamika pemerintahan desa yang aktif serta menjadi desa perkotaan dengan kebutuhan pelayanan yang kompleks dan cepat. Waktu penelitian berlangsung selama bulan Maret-Mei 2025. Informan

dipilih secara *purposive*, yaitu berdasarkan posisi, pengalaman, dan pengetahuan yang relevan dengan topik yang diteliti.

Menurut Moleong (2021:132), *teknik purposive* digunakan untuk menentukan informan yang dianggap paling mengetahui dan terlibat langsung dalam fenomena yang diteliti. Informan dalam penelitian ini meliputi: Kepala Desa Baning Kota, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Perangkat desa, dan Tokoh masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*), Observasi Lapangan, dan Dokumentasi.

Menurut Bungin (2020:109), kombinasi antara wawancara, observasi, dan dokumentasi akan menghasilkan data yang kuat dan saling menguatkan (*triangulasi data*). Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, yang disadur dan dijelaskan oleh Salim (2017:142) analisis ini dilakukan secara berulang melalui tiga langkah: Reduksi Data (*Data Reduction*): Menyortir, memilih, dan menyederhanakan data lapangan yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian Data (*Data Display*): Menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel sederhana, atau matriks tematik. Dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*): Mengambil makna dari data yang telah disajikan, serta melakukan verifikasi secara terus-menerus untuk menjaga keabsahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagai desa yang berada di kawasan perkotaan Kecamatan Sintang, Desa Baning Kota memiliki tantangan tersendiri, seperti urbanisasi, kebutuhan infrastruktur yang meningkat, dan pelayanan administrasi yang cepat. Oleh karena itu, penerapan tata kelola pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab menjadi sangat relevan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Desa Baning Kota Kecamatan Sintang bahwa Penduduk Desa Baning Kota berjumlah 8.854 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 2.650 yang terdiri dari jumlah laki-laki 4.500 orang dan jumlah perempuan 4.354 yang tersebar di 6 (enam) Dusun yang mengalami peningkatan penduduk setiap tahun. Dengan jumlah penduduk yang banyak ini maka pemerintah bersama dengan aparaturnya harus responsif terhadap segala layanan yang diperlukan untuk kemajuan masyarakat yang lebih baik.

Secara administratif Desa Baning Kota Kecamatan Sintang telah memiliki batas-batas wilayah yang jelas. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Puri dan Kelurahan Alai, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Martiguna, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Puri dan Kelurahan Ladang, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Ana.

Selanjutnya komposisi penduduk Desa Baning Kota menurut mata pencaharian terlihat bahwa pada umumnya mata pencahariannya sebagian besar mengurus rumah tangga,

petani, dan wiraswasta, PNS dan P3K serta karyawan swasta. Rata-rata masih di dominasi oleh wiraswasta. Perkembangan masyarakat dipengaruhi oleh pergeseran masyarakat yang mengikuti gaya kehidupan perkotaan sehingga masyarakat tetap bertahan untuk bekerja pada wilayah perkotaan. Hal tersebut juga kemajuan teknologi informasi yang menyebabkan masyarakat komposisi penduduk Desa Baning Kota terbiasa dengan transformasi dan urbanisasi.

Secara religius masyarakat Desa Baning Kota menganut dalam beberapa agama yang ada. Jumlah penganut agama islam berjumlah 5.817 orang, agama katolik berjumlah 1.471 orang, agama kristen berjumlah 1.328 orang, Budha berjumlah 177 orang, konghucu 37 orang dan hindu 4 orang. Artinya bahwa dengan data tersebut maka penganut agama di dominasi oleh agama islam dan agama katolik, dan kristen. Hal ini tidak menjadi perbedaan di kalangan masyarakat justru menjadi perekat dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Baning Kota. Agama menjadi panutan dalam membimbing masyarakat kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, agama sebagai petunjuk dalam menuntun kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan hal mutlak dilaksanakan oleh pemerintahan desa karena itu, tingkat pendidikan aparatur desa menjadi penting dalam menjalankan pemerintahan desa. Di sisi lain, bahwa fungsi pemerintahan desa

harus berfokus pada tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa khususnya berkaitan dengan pelayanan masyarakat sehingga harus bersinergi masyarakat dengan baik. Oleh karena itu, kualitas sumberdaya manusia aparatur desa menjadi penting bagi peningkatan kinerja Pemerintah Desa Baning Kota Sintang. Observasi yang diperoleh dari Kantor Desa Baning Kota menunjukkan bahwa tingkat pendidikan aparatur desa sudah cukup baik, sebab ada yang sarjana (S1), diploma, dan berpendidikan SMA. Tentunya kepala desa tetap berupaya melakukan dan meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui diklat, Bimtek, workshop dalam rangka kinerja pemerintahan desa maju dan bertanggung jawab.

Pemerintah Desa Baning Kota ditunjang dengan 12 orang aparatur desa yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta melayani masyarakat. Tugas dan fungsinya bagaimana mengelola pemerintahan desa dengan efektif, terbuka dan responsif. Aparatur desa sebagai penunjang utama menambah spirit penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.

Tata kelola pemerintahan desa yang responsif menjadi fondasi penting dalam menciptakan program pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Responsivitas pemerintah desa mencerminkan sejauh mana pemerintah desa tanggap terhadap kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan

masyarakatnya. Sisi ini tata kelola pemerintahan desa yang responsif di Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, menjadi sangat relevan untuk mampu mengakomodasi harapan masyarakat secara nyata.

Sebagaimana observasi penulis bahwa menuju tata kelola pemerintahan yang responsif, Pemerintah Desa Baning Kota dalam melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (musrenbangdes) dengan melibatkan semua unsur pemerintah desa, BPD, Pendamping, tokoh pemuda, masyarakat dan wakil DPRD Sintang. Keterlibatan ini dalam menghasilkan kebijakan program yang terarah, terbuka dan responsif kepada setiap kebutuhan masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan bahwa semua yang dilakukan ini agar sesuai dengan sasaran yang diharapkan dengan mengacu kepada anggaran dana desa sehingga target dan sasaran jelas.

Tata kelola responsif merujuk pada kemampuan pemerintah untuk mendengar, memahami, dan bertindak cepat terhadap kebutuhan masyarakat. Merujuk pada hasil wawancara informan bahwa langkah dan upaya yang dilakukan harus bersinergi dengan program yang dilaksanakan. Bentuk komitmen Pemerintah Desa Baning Kota dalam pembangunan sumberdaya manusia dengan pembangunan PAUD Intan Kasih yang anggarannya murni dari dana desa. Hal ini menunjukkan sikap kecepatan pelayanan, keterbukaan serta kepekaan terhadap perubahan kebutuhan warga.

Di tingkat desa, responsivitas sangat dipengaruhi oleh kedekatan antara aparatur desa dan warga, dalam menjalankan program yang nyata di masyarakat. Desa yang responsif bukan hanya menunggu laporan dari masyarakat, tetapi proaktif dalam mendeteksi dan menyelesaikan persoalan publik. Kebutuhan masyarakat yang cepat berubah, seperti layanan, penanganan sampah, dan ketersediaan fasilitas umum, membutuhkan respons cepat dari pemerintah desa. Di sisi lain, penggunaan dana desa menuntut pertanggungjawaban yang ketat, baik secara administrasi maupun sosial. Menumbuhkan sikap kepercayaan kepada masyarakat harus dilakukan dengan kerja keras dan kerja nyata.

Hasil wawancara dengan Informan diketahui bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan anak usia dini menjadi penting dilakukan agar menambah semangat anak-anak untuk belajar. Semuanya dilakukan untuk pembangunan generasi muda dan pelayanan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Bukan hanya pada program ini saja, namun Pemerintah Desa Baning Kota, meluncurkan program usaha ayam petelur. Program sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan warganya.

Hasil wawancara dengan informan bahwa program usaha ayam petelur ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan pangan lokal, khususnya telur, yang selama ini banyak dipasok dari luar daerah. Dana desa

yang di anggarkan Rp180 juta untuk kebutuhan usaha ayam petelur. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membeli bibit ayam petelur, pakan, vitamin, serta pembangunan kandang bagi 100 kepala keluarga yang terlibat dalam program ini.

Orientasi sikap responsif dari Pemerintah Desa Baning Kota sebagai komitmen dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam program-program pembangunan yang terarah dan efektif. Prinsip ini akan menghadirkan hasil yang berpotensi menjadi sebuah model tata kelola pemerintahan desa yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Tata kelola pemerintahan yang responsif adalah sebuah pendekatan pemerintahan yang menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai pusat perhatian kebijakan. Pemerintah dituntut untuk bersikap cepat tanggap, komunikatif, partisipatif, adaptif, dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Responsivitas Pemerintah Desa terhadap kebutuhan masyarakat, sebagaimana hasil wawancara dengan informan bahwa menerapkan prinsip tersebut harus bersinergi dengan semua aparatur desa, BPD, dan masyarakat agar program-program pembangunan masyarakat dapat dijangkau serta di akses oleh masyarakat.

Komitmen Pemerintah Desa Baning Kota menunjukkan tingkat responsivitas yang cukup baik terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan musyawarah desa dilaksanakan untuk menyerap aspirasi

warga, terutama dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Tanggapan Cepat atas Laporan Warga, dan Pelayanan Administratif Cepat. Transparansi Pengelolaan Dana Desa, evaluasi Program. Menunjukkan responsif pemerintahan desa dan efektivitas kinerja aparatur desa dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini sejalan dengan bagaimana akuntabilitas desa mencakup pelaporan terbuka dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Baning Kota telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab secara cukup baik. Responsivitas terlihat dalam pelayanan publik dan keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat. Sementara itu, tanggung jawab tercermin dari transparansi keuangan dan pelaporan kegiatan pembangunan. Namun demikian, penerapan prinsip good governance masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal digitalisasi pelayanan dan pemberdayaan pemuda. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas aparatur dan pelibatan masyarakat secara lebih luas.

Tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan tidaklah mudah, namun ada beberapa kendala sebagai hasil wawancara dengan informan bahwa Keterbatasan sumberdaya aparatur desa yang belum menguasai teknologi

informasi dengan baik. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam berdiskusi dalam forum-forum desa. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa prinsip tata kelola belum sepenuhnya optimal dan masih membutuhkan penguatan dalam kapasitas dan partisipasi warga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tata kelola pemerintahan desa yang responsif di Desa Baning Kota Kecamatan Sintang, menunjukkan bahwa pemerintah desa melakukan responsif dengan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sikap responsif ini yang dilakukan pemerintah desa dengan berupaya untuk menjadi pemerintahan yang responsif dengan terbuka. Beberapa kendala yang dihadapi seperti kemampuan aparatur desa dalam menguasai teknologi informasi dan masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam forum-forum diskusi desa. Saran dalam penelitian ini bahwa tata kelola pemerintahan yang responsif Pemerintah Desa Baning Kota tetap dijaga dan ditingkatkan lagi melalui kecepatan dalam merespon setiap persoalan yang timbul di masyarakat, sehingga dapat teratasi dengan efektif dan professional.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, (2016). Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima). Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan

- Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hardiyansyah. (2021). *Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Gava Media.
- Harjanto, A. (2020). *Pemerintahan Responsif di Era Disrupsi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Indriani, F. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik dan Responsivitas Pemerintah*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, R. & Sari, D. (2022). *Good Governance dan Responsivitas Pemerintah Desa*. Surabaya: Airlangga Press.
- Suharyo, Widodo. (2020). *Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Kencana.
- Suradika, Eko. (2019). *Manajemen Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. (2016). *Paradigma Baru Tata Kelola Pemerintahan*. Yogyakarta : UGM Press.
- Rizal, M. (2021). *Inovasi Pelayanan Publik di Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Prenadamedia.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.